

ABSTRAK

Kesehatan adalah sebagai salah satu unsur kesejahteraan sebagaimana termaktub dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Obat dalam penggunaannya bertujuan untuk menyembuhkan dan memulihkan sebuah penyakit akan tetapi dalam penggunaannya seringkali disalahgunakan, salah satu obat yang sering disalahgunakan oleh remaja adalah jenis obat batuk cair. Politik kriminal merupakan suatu usaha yang rasional dalam menanggulangi tindak pidana kejahatan khususnya dalam penyalahgunaan obat batuk cair di kalangan remaja. Dalam penelitian ini penulis bertujuan untuk meneliti dua permasalahan, yang pertama Bagaimana penerapan politik kriminal dalam tindak pidana penyalahgunaan obat batuk cair? yang kedua Apa kendala dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan obat batuk cair?.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan melakukan tinjauan terhadap peraturan perundang – undangan mengenai tindak pidana kejahatan penyalahgunaan obat batuk cair dengan bahan pustaka. Bahan hukum utama yaitu bahan hukum primer yang terdiri dari Norma hukum, kaidah hukum dan peraturan perundang-undangan. Tahapan yang dilakukan dalam menyusun penelitian ini dengan tahapan kepustakaan. Data yang dilakukan melalui cara yang berasal dari bahan hukum primer kemudian data tersebut disusun dan dianalisa melalui metode deskriptif analisis.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan obat batuk cair di kalangan remaja belum berjalan dengan efektif. Hal ini dapat dilihat dari setiap tahunnya dalam penyalahgunaan obat batuk cair ini semakin marak terjadi dan menyebar terhadap kota – kota yang sedang berkembang seperti dalam objek penelitian penulis yaitu di Kota Jember dan Kota Cimahi. Terdapat beberapa faktor kendala dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan obat batuk cair di kalangan remaja yaitu: Faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor Lingkungan, dan faktor masyarakat. Saran dalam penelitian ini adalah Pemerintah hendaknya melakukan perubahan atau menambahkan peraturan hukum (undang-undang) dan melakukan sosialisasi yang menarik tentang penyalahgunaan obat, khususnya dalam kasus obat batuk cair. Perlunya penerapan hukum yang tegas dan pengawasan extra dari berbagai pihak mulai dari Pemerintah, Kepolisian , instansi – instansi terkait seperti BPOM dan Dinas Kesehatan serta masyarakat dan keluarga harus lebih proaktif dalam menanggulangi penyalahgunaan obat batuk cair ini.

Kata Kunci : Politik Kriminal, Obat batuk cair, Remaja

ABSTRACT

Health is as one of the elements of well-being as stipulated in Article 28 H paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Drugs in their use are intended to cure and restore a disease. However, in practice it is often misused. One drug that is often misused by teenagers is a type of cough syrup. Crime politics is a rational effort in overcoming crime, especially in the misuse of cough syrup among teenagers. In this study the authors aim to examine two problems, the first is how the application of crime politics in the criminal act of misuse of cough syrup? And the second is what are the obstacles in overcoming the crime of misuse of cough syrup?.

This research uses a normative juridical approach by conducting a review of the laws and regulations regarding the crime of misuse of cough syrup with library materials. The main legal material is primary legal material consisting of legal norms, legal rules and regulations. The stages carried out in compiling this research are the stages of literature. Data is collected by means of primary legal material, and then the data is compiled and analyzed through descriptive analysis.

The results of this study can be concluded that the prevention of misuse of cough syrup among teenagers has not been effective. This can be seen from the misuse of this cough syrup which is increasingly happening every year and spreads to cities that are developing as in the object of author's research namely Jember City and the Cimahi City. There are several obstacles in the prevention of the misuse of cough syrup among adolescent, namely : legal factor, law eforcement factor, evironmental factor, and community factor. Suggestions in this study are the government should make changes or add legal regulations (laws) and conduct interesting socialization about drug misuse, especially in the care of cough syrup. The need for stict law eforcement and extra oversight from various parties ranging from the Government, Poilice, related institutions such as BPOM and the Departement of Health and the community and family must be more proactive in tackling the misuse of this cough syrup.

Keywords : Crime Politics, Cough Syrup, Teenagers

KATA PENGANTAR